

**Persepsi Masyarakat dan Evaluasi Pembentukan Bumdes****Oleh:****<sup>1</sup> M. Faishol Abidin; <sup>2</sup> Sugiyanto; <sup>3</sup> Sujarwo**<sup>123</sup>. Departemen Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, IndonesiaEmail. [faishol@student.ub.ac.id](mailto:faishol@student.ub.ac.id)**Abstrak**

Kegiatan BUMDes sepenuhnya memanfaatkan potensi desa serta didasari dari kebutuhan masyarakat desa. Akan tetapi, pada pelaksanaannya tidak sedikit BUMDes belum berkembang dengan baik yang akhirnya bubar dan tidak beroperasi lagi. Tujuan penelitian untuk melihat pengetahuan masyarakat tentang BUMDes dan mengevaluasi latar belakang pembentukan BUMDes di Kecamatan Sumberejo berdasarkan dengan PERMEN RI No. 11 Tahun 2021 dan PERDA Kabupaten Bojonegoro No. 4 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan kuisioner dengan responden pada persepsi adalah masyarakat umum di Kecamatan Sumberejo dan responden evaluasi pembentukan BUMDes adalah perangkat desa dan tokoh masyarakat yang mengikuti musyawarah pembentukan BUMDes. Persepsi masyarakat tentang BUMDes hampir >50% masyarakat sudah mengetahui tentang BUMDes yakni dari pengertian, tujuan, nama serta jenis usaha BUMDes di desa masing-masing, akan hanya 29,7% masyarakat yang tergabung dalam keanggotaan BUMDes. Hasil kesesuaian paling tinggi dari evaluasi pembentukan BUMDes adalah dari ide baru sebanyak 61,90% dan kesesuaian terhadap usaha masyarakat desa adalah 59,05%. Evaluasi latar belakang pembentukan serta pelestarian berkelanjutan pada semua kriteria sesuai dengan peraturan dengan interval nilai  $\geq 50\%$ . Pembentukan BUMDes telah sesuai dengan Peraturan yang mana asal-usul BUMDes yang dibentuk paling banyak dari ide baru dan memanfaatkan usaha masyarakat yang sudah ada.

**Kata Kunci:** Persepsi; Evaluasi; Pembentukan; BUMDes**Abstract**

community. However, in practice, there are many BUMDes that have not developed well and eventually disbanded and are no longer operating. The purpose of the research is to see the community's knowledge about BUMDes (perception) and evaluate the background of BUMDes formation in Sumberejo Sub-district based on PERMEN RI No. 11 of 2021 and Bojonegoro Regency PERDA No. 4 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises. This research is a quantitative descriptive research using questionnaires with respondents on perceptions are the general public in Sumberejo Sub-district and respondents on participation in the formation of BUMDes are village officials and community leaders who participated in the BUMDes formation deliberations. Public perception of BUMDes is almost more than 50% (>50%) of the community already knows about BUMDes, namely from the definition, purpose, name and type of BUMDes business in their respective villages, only 29.7% of the community are members of BUMDes membership. The results of the highest suitability of participation in the formation of BUMDes is from new ideas as much as 61.90% and the suitability of village community businesses is 59.05%. Evaluation of the background of formation as well as sustainable preservation on all criteria in accordance with the regulations with a value interval  $\geq 50\%$ . The formation of BUMDes is in accordance with the Regulation where the origin of BUMDes formed mostly from new ideas and utilizing existing community businesses.

**Keywords:** Perception; Evaluation; Formation; BUMDes**PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional saat ini difokuskan dalam Pembangunan desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Undang-undang tersebut membawa model pembaharuan dalam serangkaian pembangunan nasional. Perubahan tersebut ada pada proses transformasi sosial yang sustain berkelanjutan

melalui perubahan paradigma, kebijakan publik, dan gerakan sosial dari masyarakat desa (Hermawan, 2015). Desa memiliki pemerintahan yang berotonom dan berotonomi asli, dengan demikian desa mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Ariadi, 2019). Salah satu kegiatan otonomnya adalah kesempatan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan desa mandiri yang dapat berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Adhari, 2017). Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. BUMDES merupakan salah satu sarana yang bertujuan dalam usaha peningkatan ekonomi desa didasari kebutuhan dan potensi desa seperti memfasilitasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional oleh masyarakat desa (Febriyani, 2018).

Sesuai penelitian Suprojo (2019) identifikasi BUMDes di Jawa Timur Dimana pendirianya disesuaikan dengan karakteristik lokalitas dan kapasitas ekonomi desa yang ada, misalnya pengelolaan pasar desa, wisata desa, kegiatan simpan-pinjam, pengembangan kerajinan masyarakat dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 bahwa BUMDes sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, danf atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Akan tetapi, pada pelaksanaannya tidak sedikit BUMDes yang sudah berdiri belum berkembang dengan baik bahkan terdapat beberapa BUMDes yang akhirnya bubar dan tidak beroperasi lagi. salah satu faktor penyebabnya adalah pada tahap awal membuat perencanaan pengembangan desa, perlu dilakukan analisa potensi desa untuk mencari potensi unggulan apa saja yang akan menjadi ciri khas suatu desa (branding) sehingga mudah dikenal oleh masyarakat (Terttiaavini, 2021). Salah satu hasil penelitian Aini (2020) menyatakan BUMDes Mitra Sehati merupakan salah satu contoh BUMDes yang belum melihat potensi desa dalam program kerjanya. Program belum mendasarkan pada kemampuan SDM dan potensi desa, bahkan cenderung menyimpang dari tujuan BUMDES dan aturan sehingga sulit untuk mencapainya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat persepsi masyarakat terhadap pengetahuan tentang BUMDes serta evaluasi pembentukan BUMDes di Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 4 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa agar sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan September – Oktober 2023 Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro. Pelaksanaan penelitian dilakukan. Materi penelitian adalah Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro. Pemilihan sampel dilakukan dengan random sampling untuk melihat persepsi masyarakat secara umum terhadap pengetahuan tentang BUMDes di Kecamatan Sumberejo sedangkan purpose sampling untuk responden pada variabel evaluasi pembentukan BUMDes yakni dari perangkat desa serta tokoh masyarakat yang mengikuti musyawarah pembentukan

BUMDes dimana sampel merupakan pengurus BUMDes, pemerintah desa, perwakilan Lembaga Desa lainnya serta tokoh masyarakat yang ikut dalam perencanaan pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Total responden persepsi sebanyak 170 orang dari masyarakat umum yang tinggal di Kecamatan Sumberejo sedangkan responden untuk evaluasi pembentukan BUMDes adalah 108 orang yang mewakili dari dua puluh enam desa di Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah semua hasil musyawarah yang melatarbelakangi pemilihan jenis usaha pada Badan Usaha Milik Desa. Variabel terikat adalah ketentuan dasar dalam penentuan jenis usaha Badan Usaha Milik Desa dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 4 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi atau survei dengan menggunakan kuisioner untuk memberikan gambaran dari jawaban yang diberikan responden.

Kuisioner menggunakan skala Guttman yang diberikan nilai/skoring untuk jawaban yang bersifat jelas, tegas dan konsisten. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan kesesuaian latar belakang pembentukan BUMDes dengan peraturan. Panduan pemberian skoring adalah jumlah pilihan = 2 (setuju-tidak setuju) (Muchlis, 2017). Analisa data pada persepsi masyarakat menggunakan analisa deskripsi frekuensi menggunakan software SPSS 24 sedangkan pada analisa evaluasi menggunakan interval skoring. Jumlah respon pada tiap pertanyaan = 105; skoring terendah = 0 (pilihan jawaban yang salah); skoring tertinggi = 1 (pilihan jawaban yang benar); jumlah skor terendah = skoring tertinggi x responden = 0 x 100 = 0 (0 %); jumlah skor tertinggi = skoring tertinggi x responden = 1 x 100= 100 (100 %). Analisa data dari scoring Guttman adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Interval (I)} &= \text{Range (R)/Kategori (K)} \\ \text{Range (R)} &= \text{skor tertinggi} - \text{skor terendah} \\ &= 100 - 0 \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Keterangan : Kategori (K) = 2 adalah banyaknya kriteria yang disusun pada kriteria objektif suatu variabel; yaitu proses pembentukan yang sesuai dengan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan perundang-undangan.

$$\begin{aligned}\text{Interval (I)} &= 100/2 \\ &= 50\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Kriteria penilaian} &= \text{skor tertinggi} - \text{interval} \\ &= 100 - 50 \\ &= 50\%,\end{aligned}$$

Sehingga, proses pembentukan yang sesuai dengan perundang-undangan  $\geq 50\%$  proses pembentukan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan  $< 50\%$ .

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan BUMDes di Kecamatan Sumberejo**

Keberadaan BUMDes dapat dirasakan oleh masyarakat, perlu dilakukan respondensi terhadap pengetahuan masyarakat tentang BUMDes yang ada di desa mereka. Informasi-informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat desa tentang BUMDes salah

satunya adalah tentang pengertian, keberadaan, tujuan, nama, jenis usaha yang dijalankan serta keikutsertaan masyarakat untuk tergabung dalam anggota BUMDes (Novandi, 2019). Berikut adalah distribusi pengetahuan masyarakat terhadap BUMDes di desa di Kecamatan Sumberejo.

**Tabel 1. Distribusi Frekuensi Persepsi Masyarakat Kecamatan Sumberejo Terhadap Keberadaan BUMDes**

No	Pengetahuan BUMDes	n	%
1	Pengertian	153	87.4
2	Keberadaan	147	84
3	Tujuan	100	57.1
4	Nama	146	83.4
5	Jenis Usaha	105	60
6	Keanggotaan	52	29.7

(Sumber: Data Primer, 2023)

Pengetahuan masyarakat di Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro tentang pengertian BUMDes dengan jawaban benar sebanyak 87.4% atau sekitar 153 responden. Hasil distribusi frekuensi ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat telah mengetahui tentang arti BUMDes. Sedangkan tingkat pengetahuan tentang keberadaan BUMDes di desa masing-masing hasil distribusi frekuensi menunjukkan sebanyak 84% atau 147 orang telah mengetahui bahwa di desa mereka terdapat BUMDes. Pada tingkat pengetahuan tentang tujuan didirikannya BUMDes sebanyak 57.1% atau 100 orang responden mengetahui tentang tujuan didirikannya BUMDes di desa mereka. Masyarakat juga telah mengetahui nama masing-masing BUMDes yang berdiri di desa mereka dengan persentase sebanyak 83.4% atau 146 orang. Sedangkan masyarakat yang mengetahui jenis usaha yang dijalankan di BUMDes di desa mereka masing-masing adalah sebanyak 60 % atau 106 orang.

Tingkat pengetahuan tentang tujuan dan jenis usaha dimana lebih dari setengah jawaban responden mengetahui mengindikasikan bahwa keberadaan program BUMDes telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat lebih banyak yang tahu tentang BUMDes. Akan tetapi jika dilihat hasil keanggotaan masyarakat yang hanya 29.7 atau 52 orang yang menjadi anggota BUMDes menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam memanfaatkan BUMDes sebagai sarana meningkatkan kebutuhan ekonomi masih sedikit. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam pelaksanaan BUMDes, pihak pemerintah desa masih kesulitan dalam melakukan pengembangan. Adanya program BUMDes belum bisa menjangkau sebagian besar masyarakat, meskipun begitu keberadaan BUMDes untuk dapat membantu masyarakat masih sangat dibutuhkan (Prasetyo, 2016).

#### **Karakteristik Responden pada Evaluasi Pembentukan BUMDes di Kecamatan Sumberejo**

Data responden dari penelitian ini diambil dari 26 Desa di Kecamatan Sumberejo yang merupakan masyarakat yang mengikuti musyawarah pembentukan BUMDes di desa masing-masing seperti dari perangkat desa, tokoh masyarakat yang dipercaya serta lembaga desa lainnya. Hanya karakteristik responden dari desa tersebut dilihat dari pekerjaan ditampilkan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Karakteristik Pekerjaan Responden dalam Pembentukan BUMDes Di Kecamatan Sumberejo.**

Karakteristik Pekerjaan	n	%
Pemerintah Desa	80	76,19
BPD	11	10,48
Tokoh Masyarakat	7	6,67
Lembaga Desa Lainnya	7	6,67
<b>Total</b>	<b>105</b>	<b>100</b>

Keterangan : n = Jumlah responden

(Sumber : Data Primer, 2023)

Karakteristik responden dilihat dari pekerjaan yang terbanyak adalah dari pegawai pemerintah desa sebanyak 76,19 %, diikuti dari Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 10,48 % sedangkan dari tokoh masyarakat dan Lembaga Desa lainnya sebanyak 6,67 %. Hal ini sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 4 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BAB II tentang pendirian BUMDes Pasal 6 dimana pendirian BUMDes bersama-sama melalui musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh badan kerjasama antar desa yang terdiri dari pemerintah desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga desa lainnya, dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. Hal ini juga telah dikemukakan oleh Sari (2023) bahwa pendirian BUMDes dilakukan dengan cara inisiatif dari masyarakat dengan cara musyawarah desa didampingi Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapat persetujuan bersama. Pembentukan BUMDes secara efisien melibatkan seluruh komponen masyarakat dan perangkat desa, seperti Kepala Desa, BPD, kelompok pemuda, dan masyarakat melalui Musyawarah Desa (Hardjani, 2021).

### Evaluasi Pembentukan BUMDes di Kecamatan Sumberejo

Jenis usaha yang akan dijalankan BUMDes di Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro adalah dari jenis usaha seperti perdagangan, bisnis sosial, penyewaan, jasa perantara, keuangan dan usaha bersama. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dimana jenis usaha yang dapat dibentuk BUMDes adalah dari bidang ekonomi dan/ pelayanan umum.

Evaluasi dari pembentukan BUMDes terutama dalam penentuan jenis usaha yang dijalankan BUMDes diambil dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 4 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Hal tersebut berkaitan dengan efisiensi BUMDes yang mana akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memanfaatkan potensi desa. Tujuan pembentukan (BUMDes) adalah untuk menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat sehingga BUMDes dapat menjadi usaha desa yang mampu memaksimalkan potensi masyarakat desa baik dari ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia (Wirsa, 2020). Kriteria-kriteria yang dinilai dalam evaluasi pembentukan BUMDes adalah dari asal jenis usaha BUMDes yang dijalankan, latar

belakang faktor pembentukan BUMDes dan aspek pelestarian adat istiadat desa dan keberlanjutan terhadap jenis usaha BUMDes yang dipilih.

Kriteria evaluasi asal jenis usaha BUMDes merupakan asal-usul pemeliharaan jenis usaha BUMDes apakah berasal dari optimalisasi aset desa yang sudah ada, memanfaatkan usaha masyarakat desa, jenis usaha dipilih dari luaran kegiatan PNPM, atau jenis usaha merupakan ide baru yang dihasilkan dari proses musyawarah desa. Semua kriteria tersebut telah disebutkan dalam peraturan pemerintah ataupun peraturan daerah dan menjadi dasar evaluasi. Hasil evaluasi asal jenis usaha BUMDes dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3. Evaluasi Penentuan Jenis Usaha BUMDesa**

Asal BUMDes	Hasil Responden	
	Interval Nilai (%)	Kriteria
<b>Optimalisasi Aset Desa</b>	47,62	Tidak Sesuai
<b>Usaha Masyarakat Desa</b>	59,05	Sesuai
<b>Eks-kegiatan PNPM</b>	10,48	Tidak Sesuai
<b>Ide Baru</b>	61,90	Sesuai

(Sumber: Data Primer, 2023)

Hasil persentase jawaban responden yang merupakan peserta musyawarah desa menjelaskan bahwa asal BUMDes di Kecamatan Sumberejo yang memiliki hasil kesesuaian paling tinggi adalah dari ide baru yang disepakati bersama dalam musyawarah yakni sebanyak 61,90%. Kriteria asal BUMDes yang kedua adalah kesesuaian terhadap usaha masyarakat desa adalah 59,05%. Kriteria asal BUMDes selanjutnya adalah optimalisasi asset desa dan luaran kegiatan PNPM berturut-turut sebanyak 47,62 % dan 10,48 % yang mana hasil prosentase tersebut menunjukkan ketidaksesuaian asal BUMDes yang dibentuk di Kecamatan Sumberejo. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Zunaidah (2021) tentang BUMDes di Desa Keboireng Kecamatan Tulungagung yang berfokus pada keberlanjutan UMKM desa setempat yang memproduksi keripik pisang dan tempe. Disisi lain, BUMDes di desa tersebut juga membuat usaha dengan ide baru yakni memanfaatkan hasil perikanan yang melimpah menjadi produk olahan dan dipasarkan di sekitar pantai dimana terdapat wisata yang juga dikelola BUMDes.

Kriteria latar belakang pembentukan BUMDes adalah dasar atau alasan yang dipilih dalam penentuan jenis usaha BUMDes berdasarkan kebutuhan masyarakat, mengoptimalkan potensi desa yang sudah ada, memanfaatkan sumber daya manusia atau masyarakat desa yang memiliki ketrampilan dalam suatu usaha serta memaksimalkan potensi usaha yang sudah ada. Hasil evaluasi latar belakang pembentukan BUMDes dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4. Evaluasi Latar Belakang Pembentukan BUMDes**

Latar Belakang Pembentukan	Hasil Responden	
	Interval Nilai	Kriteria
<b>Kebutuhan Masyarakat</b>	80,95	Sesuai
<b>Potensi Desa</b>	72,38	Sesuai
<b>Sumber daya Manusia</b>	78,10	Sesuai
<b>Potensi Usaha</b>	90,48	Sesuai

(Sumber Data Primer, 2023)

Hasil presentase jawaban responden menjelaskan bahwa latar belakang pembentukan BUMDes di Kecamatan Sumberejo sangat sesuai dengan peraturan pemerintah dan daerah yang mana latar belakang pembentukan dilihat dari kebutuhan masyarakat sebesar 80,95 %, potensi desa 72,38 %, sumber daya manusia 78,10 %, dan potensi usaha 90,48 %. Dari data tersebut dapat dijelaskan dasar atau alasan yang dipilih dalam penentuan jenis usaha BUMDes di Kecamatan Sumberejo berasal dari seluruh ketentuan pilihan dari peraturan yang telah ditetapkan. Alasan masyarakat memilih jenis usaha BUMDes bervariasi mulai dari melihat kebutuhan masyarakat, mengoptimalkan potensi desa yang sudah ada, memanfaatkan sumber daya manusia atau masyarakat desa yang memiliki ketrampilan dalam suatu usaha serta memaksimalkan potensi usaha yang sudah ada.

Tujuan didirikannya BUMDes sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 yang dikutip oleh Kartikasari (2023) yaitu untuk memperkuat perekonomian desa melalui peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa secara ekonomi. Pelaksanaan kegiatan BUMDes diharapkan memiliki orientasi terhadap kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki tiap desa. Hal tersebut kembali kepada tujuan pembangunan dimana secara praktis dan teoritis pembangunan ekonomi harus mengarah secara langsung kepada masyarakat sebagai obyek utama dalam kemajuan ekonomi (Wirsa, 2020). Desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Hal tersebut membuka peluang desa untuk otonom dalam pengelolaan baik kepemerintahan maupun sumber daya ekonominya (Anggraeni, 2016). Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), desa menjalankan fungsinya demi kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang sudah ada. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (UU Nomor 32 Tahun 2004). BUMDes terlihat pada sumber dana untuk peningkatan pendapatan, kebutuhan masyarakat yang harus dirasakan oleh masyarakat keseluruhan. Pembangunan desa secara mandiri yang tidak hanya bergantung pada anggaran dan bantuan (Pradnyani, 2019).

Kriteria pembentukan BUMDes berdasarkan pelestarian dan keberlanjutan adat istiadat desa adalah perlindungan religi, adat istiadat, perilaku sosial serta kearifan lokal. Hasil evaluasi pembentukan BUMDes terhadap pelestarian dan keberlanjutan adat istiadat desa dapat dilihat pada tabel 5.

**Tabel 5. Evaluasi Pembentukan BUMDes terhadap Pelestarian dan Keberlanjutan Adat Istiadat Desa**

<b>Pelestarian dan Keberlanjutan</b>	<b>Hasil Responden</b>	
	Interval Nilai	Kriteria
<b>Perlindungan Religi</b>	71,43	Sesuai
<b>Adat Istiadat</b>	71,43	Sesuai
<b>Perilaku Sosial</b>	85,71	Sesuai
<b>Kearifan Lokal</b>	80,95	Sesuai

(Sumber Data Primer, 2023)

Hasil presentase hasil jawaban responden terhadap pelestarian dan keberlanjutan adalah sesuai dengan peraturan pemerintah dan daerah. Hal tersebut terlihat pada semua hasil prosentase interval nilai  $\geq 50\%$  dengan rincian perlindungan religi 71,43 %, adat istiadat 71,43 %, perilaku sosial 85,71 % dan kearifan lokal 80,95 %. Potensi Desa yang sudah digali oleh pemerintah desa sebagai modal asset untuk menjalankan BUMDes harus mempertahankan kearifan budaya lokal sebagai upaya pelestarian tanpa meninggalkan ciri khas pedesaan. Penguanan potensi desa berbasis kearifan lokal menjadi peluang usaha bagi masyarakat desa dengan tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan (Setiati, 2023). Kearifan lokal yang dimaksud sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dtelah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat tentang keberadaan BUMDes di Kecamatan Sumberejo cukup baik dengan rata-rata frekuensi  $> 50\%$  pada indikator pengertian, keberadaan, nama dan jenis usaha BUMDes akan tetapi pada indikator tingkat partisipasi menjadi anggota hanya 29.7 %. Evaluasi dalam pembentukan jenis usaha pada BUMDes di Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro menghasilkan latar belakang pemilihan jenis usaha BUMDes dari asal jenis usaha di Kecamatan Sumberejo paling banyak adalah jenis usaha dengan ide baru serta memanfaatkan usaha masyarakat yang sudah ada. Evaluasi latar belakang pembentukan BUMDes dan pelestarian berkelanjutan di Kecamatan Sumberejo sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dan daerah.

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah peran masyarakat dalam penentuan jenis usaha sangat berkaitan penting terhadap keberlangsungan BUMDes. Oleh sebab itu tingkat persepsi masyarakat tentang BUMDes harus ditingkatkan terutama kaitannya dalam paertisipasi anggota BUMDes serta kriteria peserta dalam musyawarah pembentukan BUMDes diharapkan sangat bervariatif yang mana peserta tersebut memiliki peranan penting dalam kemajuan desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aini, F, N dan Taufik Purboy. (2020). Mengkaji Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penopang Perekonomian Desa (Studi Kasus Kegagalan BUMDES di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. *Majalah Ilmiah Dinamika Adminstrasi. Purwokerto*. Volume 17, Nomor 02.

- Andhari, Agus dan Ismaidar. (2017). Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Volume 9 Nomor 1.
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus* Vol.28 (2): 155-167
- Ariadi, Andi. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal* Vol. 2, No. 2.
- Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Uulantari, N. K. W., Dewi, Y. P. (2018). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 8 No. 1.
- Handajani, Lilik, Zaenal Abidin, and Endar Pituringsih. 2021. "Pendampingan Perintisan Usaha Bumdes Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Peteluan Indah." *Abdi Insani* 8 (1): 10–17.
- Hermawan, Rico . (2015). Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia : Melihat Desa dari Sudut Pandang Aturan Perundang-Undangan. *Jurnal Desentralisasi* Volume 13, No.1.
- Kartikasari, E. D., Indira, I., Darianto, Hakim, M. A., Prasetya, D. K. (2023). Urgensi BUMDes dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Desa: Kajian Empiris di Desa Pule Kecamatan Modo. *BALANCE : Economic, Business, Management, and Accounting Journal* Vol. XX No. 1.
- Novandi, H. R. (2019). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ijen Lestari Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Community Based Tourism. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, Nomor 1. Hal : 68 – 80.
- Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakatdi Desa Tibubeneng Kuta Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 9 No. 2. 37-47.
- Prasetyo, R. A. (2016). Peranan Bumdes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika* Volume XI No.1. Hal : 86 – 100
- Sari, S. M. dan Arisena, G. M. K. (2023). Proses Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Bangli. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* Vol 04 No 01.
- Setiati, Atu. (2023). Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal: Studi Desa Wisata Sukalasana Kabupaten Garut. *Relasi Jurnal Ekonomi*. Vol.19, No. 2 ,hlm. 364-380.
- Suprojo, Agung. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmupolitik* ISSN. 2442-6962 Vol. 8 No. 4.
- Muchlis, Suryadi. (2017). *Arahan Pengembangan Agrowisata Berdasarkan Potensi Sumber Daya Lokal di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur*. Tugas Akhir. Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
- Terttiaavini, Sofian, Saputra T. S. (2021). Pendampingan Penyusunan Program Rencana Kerja Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Optimalisasi Potensi Desa Serijabo Ogan Ilir Sumatera Selatan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*. Vol. 5, No. 6, Hal. 3536-3546.

Wirsa, I. N. dan Prena, G. D. (2020). Keberadaan Bumdes Sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi Desa di Desa Telagatawang, Kecamatan Sidemen Karangasem. *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 1 No 1.

Zunaidah, Ama., Askafi, Eka., dan Daroini, Ahsin. (2021). Peran Usaha Bumdes Berbasis Pertanian Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Magister Agribisnis*. Volume 21 Nomor 1. Hal : 47 - 57